

Doktrin Filsafat Politik Jokowi Dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental)¹

Oleh
Hastangka²

Abstrak

Studi tentang Nawacita menjadi menarik perhatian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Awal kampanye Jokowi dan JK untuk maju menjadi calon presiden tahun 2014, jargon Nawacita mulai diperkenalkan dan dipopulerkan. Gagasan Nawacita menjadi menarik perhatian karena selama 15 tahun reformasi istilah negara hadir, negara tidak boleh absent, memperkuat negara, dan mempercepat pembangunan nasional menjadi semangat baru dalam percaturan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Studi ini akan menganalisis, relasi dan relevansi Nawacita dengan nilai nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, berita, dan tulisan hasil penelitian sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nawacita menjadi doktrin filsafat politik kenegaraan yang disampaikan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai bentuk komitmen politik untuk membangun negara berdasarkan semangat dan nilai nilai Pancasila. Revolusi mental menjadi bagian instrument untuk dapat mewujudkan filsafat politik Nawacita yang dirumuskan oleh Jokowi.

Kata kunci: Nawacita, Pancasila, Pembangunan, revolusi mental.

Abstract

The study of Nawacita has attracted attention in the last 10 years. At the start of Jokowi and JK's campaign to run for presidential candidates in 2014, the jargon of Nawacita was introduced and popularized. The idea of Nawacita has attracted attention because for 15 years the term state reform has been present, the state should not be absent, strengthen the state, and accelerate national development has become a new spirit in the arena of presidential and vice presidential elections in Indonesia. This study will analyze, the relationship and relevance of Nawacita with the values of Pancasila. The method used in this study uses a qualitative approach. The data used in this study were obtained from scientific journals, news, and previous research papers. Analysis of the data used in this study using analytical descriptive analysis. The results of this study indicate that Nawacita is a doctrine of state political philosophy conveyed by Jokowi and Jusuf Kalla as a form of political commitment to build a country based on the spirit and values of Pancasila. Mental revolution is part of the instrument in realizing the political philosophy of Nawacita formulated by Jokowi.

Keywords: Nawacita, Pancasila, development, mental revolution.

Pendahuluan

Istilah revolusi mental mulai dikenal dalam wacana politik di Indonesia ketika Jokowi maju dalam pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2014. Istilah ini menjadi perhatian masyarakat baik dari kalangan pengamat politik, bahasa, filsafat, dan akademisi lainnya. Istilah revolusi Mental semakin populer dengan lagu³ yang dibuat oleh Slank atau kelompok

¹Disampaikan pada diskusi di taman Sansiro, Selasa, 4 September 2018. Diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FISIPOL UGM.

² Pusat Studi Pancasila UGM, email:hastangka@gmail.com.

³ Lirik lagu yang dibuat oleh SLANK menarasikan dukungan terhadap Jokowi dengan judul lagu yang dikenal "SALAM DUA JARI, JANGAN LUPA PILIH JOKOWI".

yang mengatasnamakan *revolusi harmoni*⁴ untuk mendukung revolusi Mental. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI kemudian muncul lirik lagu yang disebut Mars Revolusi Mental⁵. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dasar pemikiran Inpres ini dikeluarkan berpijak dari konteks “memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong-royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila”. Inpres ini berisi 5 program gerakan nasional revolusi mental yaitu: 1). Program Gerakan Melayani, 2). Program Gerakan Indonesia Bersih, 3). Program Gerakan Indonesia Tertib, 4). Program Gerakan Indonesia Mandiri, 5). Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Pada awalnya revolusi mental hanya sekedar istilah populis sebagai jargon kampanye politik Jokowi maju dalam Pilpres 2014. Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, istilah revolusi mental bergeser menjadi konsep dan salah satu kebijakan pemerintah. Revolusi Mental tampaknya menjadi salah satu doktrin Filsafat Politik⁶ Jokowi dalam upaya membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip utilitarianisme⁷. Doktrin dan Filsafat Politik Jokowi juga dicantumkan dalam agenda NAWACITA sebagai dasar membuat kebijakan politik pemerintahan Jokowi-JK. Isi dari NAWACITA sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

⁴ Revolusi harmoni ini merupakan gabungan kelompok artis yang mendukung Calon Presiden nomor 2 pada waktu itu (Jokowi-JK) maju dalam pemilihan presiden tahun 2014 dengan nomor urut 2.

⁵ Diciptakan oleh Prof. Dr. H. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH.

⁶ Filsafat politik merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang tema-tema masyarakat dan negara yang ideal dari pendekatan filsafati. Beberapa topik yang muncul menjadi pokok bahasan antara lain isu keadilan, hak pribadi, kebebasan, hukum, kedaulatan, pemerintahan, otoritas/kewenangan, dan legitimasi kekuasaan.

⁷ Prinsip dasar utilitarianisme dalam suatu kebijakan sosial-politik didasarkan pada pertimbangan moral “manfaat terbesar bagi sejumlah orang terbesar”. Pendekatan yang diletakkan dalam prinsip utilitarian bahwa kegunaan atau kebahagiaan terbesar dicapai/ditekankan untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

NAWACITA dan Revolusi Mental menjadi gagasan penting dalam doktrin Filsafat Politik Jokowi. Konsepsi Revolusi Mental yang menekankan aspek melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu (lihat Inpres No 12/2016) adalah upaya dan cita-cita bersama untuk membangun tatanan negara dan masyarakat Indonesia demi kebaikan dan kebahagiaan terbesar semua masyarakat. Begitu juga konsep NAWACITA sebagai wujud Filsafat Politik Jokowi yang berupaya untuk mengurangi penderitaan dan keterpurukan masyarakat dari kehidupan sosial dan politik yang berat. Konsepsi Revolusi Mental juga dipakai oleh Badan Kesatuan Bangsa untuk merumuskan konsepsi Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan revolusi mental dan NAWACITA⁸ menarik untuk dikaji dari aspek filsafat politik. Aspek filsafat tersembunyi dibalik gagasan revolusi mental dan NAWACITA perlu digali dan diuraikan menjadi suatu bentuk yang utuh. Kenapa Revolusi Mental?, dan apa yang menjadi dasar/asumsi filosofis adanya revolusi mental?, dan bagaimana relasi revolusi mental dan NAWACITA?

Untuk dapat mengurai tentang gagasan revolusi mental dan NAWACITA perlu kembali melihat konteks sosial politik di Indonesia dimana gagasan dan ide revolusi mental dan NAWACITA terbentuk. Konteks sosial dan politik Indonesia paska reformasi

⁸ Sering disebut 9 agenda Prioritas.

mencerminkan suatu kondisi krisis dan bahkan kritis. Dimensi sosial, moral, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat dan pemerintah mengalami kehidupan karut marut. Asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai negara-bangsa tidak dipatuhi dengan baik oleh para elit politik (penyelenggara negara), masyarakat kehilangan panutan dan pedoman dalam menjalankan aktivitas kewargaan, stabilitas sosial dan politik tidak dapat dijaga dengan baik dan mengalami pasang surut. Kebijakan politik pembangunan nasional inkonsisten dan cenderung berubah-ubah, hal ini ditandai dengan perombakan kabinet, pergantian menteri, dan perubahan kebijakan politik yang cepat pada masa pemerintahan sebelumnya. Studi Lembaga Kajian Nawacita sampai pada periode tahun 2020 menjelaskan konsep dan ulasan tentang Nawacita dalam berbagai aspek terutama sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pusat perhatian utama. Nawacita dikaji oleh Lembaga Kajian Nawacita dari aspek pembangunan nasional, Sumber daya manusia, ekonomi, dan sumber daya alam (Lembaga Kajian Nawacita, 2020).

Intisari yang dapat ditemukan terhadap persoalan kebangsaan dan negara yang melanda paska reformasi ialah karakter, moral, dan perilaku penyelenggara negara yang semakin korup dan jauh dari moralitas kebangsaan (tidak lagi berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terabaikan bahkan tercampakkan oleh karena politik transaksional yang dilakukan oleh sebagian besar elit nasional dan daerah. Maka gagasan revolusi mental lahir menjadi dasar untuk merombak tatanan dan karakter penyelenggara negara yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat/masyarakat. Revolusi mental dicetuskan sebagai jargon politik dan sekaligus moral untuk menggugah masyarakat dan para elit negara untuk bisa merombak mentalitas, kinerja, dan perilaku yang lebih baik dan sesuai dengan cita-cita bersama dalam membangun republik Indonesia. NAWACITA lahir bersamaan dengan upaya percepatan pembangunan nasional terutama pembangunan infrastruktur untuk rakyat dan percepatan kesejahteraan rakyat. NAWACITA bukan RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah) tetapi sebagai kerangka dasar bagaimana menyusun dan merumuskan RPJPM agar lebih dipertegas dan ditekankan pada kerangka 9 agenda prioritas percepatan pembangunan nasional. NAWACITA lebih nampak sebagai transformasi gagasan Filsafat Politik Soekarno yang dikenal dengan TRI SAKTI yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut Sugianto visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Sugianto,2016). Dalam prakteknya NAWACITA lebih banyak ditekankan pada

proses percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dianggap kurang mendapatkan perhatian dan pendampingan oleh pemerintah karena terabaikan oleh kebijakan politik pembangunan yang dianggap kurang berkomitmen mengarah membangun dari pinggiran. Dalam Filsafat Politik Jokowi, NAWACITA diartikan sebagai “jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”, dan merupakan visi, misi dan program aksi Presiden. Latar belakang munculnya NAWACITA juga ditekankan dari tiga problem pokok bangsa sebagai berikut: 1). Merosotnya kewibawaan pemerintah, 2). Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, 3). Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Asumsi filosofis yang dapat ditangkap dari gagasan revolusi mental dan NAWACITA ialah terkait hakikat manusia yang jauh dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Sehingga melahirkan suatu kondisi dan keadaan manusia yang *distrust*, *disloyalist*, dan *disobedience* kepada negara dan manusia yang lainnya. Revolusi mental diperlukan untuk membuat perubahan dan bentuk dan agenda perubahan yang harus diwujudkan dan dituangkan dalam NAWACITA. Demikian yang menjadi hubungan antara revolusi mental dan NAWACITA. NAWACITA dinilai memiliki agenda yang cukup detail dalam menegaskan dan memosisikan keberadaan. Istilah “negara hadir” dan revolusi mental dan memajukan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian penting sebagai gagasan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia (Elsam, 2015). Salah satu praktek dari NAWACITA dalam bidang pendidikan dapat terlihat dari perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan yang tercantum dalam Nawacita juga berupaya memperhatikan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Secara lingkup nasional, pemerintah berupaya memperhatikan guruguru yang mengajar di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (Usadhi, 2017).

Kesimpulan

Doktrin dan Filsafat Politik Jokowi dan Janji NAWACITA merupakan salah satu doktrin dan filsafat politik utilitarian yang menekankan dimana pertimbangan moral dalam kebijakan politik pembangunan diarahkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat banyak. Ada sejumlah kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan NAWACITA dan gerakan nasional revolusi mental karena beberapa alasan antara lain: a). politik anggaran yang tidak konsisten untuk mendukung program NAWACITA dan gerakan revolusi mental, b). Minimnya pengawasan, kontrol, dan evaluasi program NAWACITA dan gerakan revolusi mental. c). lemahnya program gerakan revolusi mental yang bersifat konsisten dan

berkelanjutan.d). kurangnya daya dukung sumber daya manusia dan komitmen penyelenggara negara untuk mensukseskan gerakan revolusi mental dan NAWACITA. e). Perilaku elit politik yang semakin korup.

Daftar Pustaka

- Elsam.2015. Nawacita dan RPJMN sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Policy Brief Elsam seri Kebijakan Maret 2015*. Jakarta: Elsam.
- Lembaga Kajian Nawacita.2020. Dialog Nasional Mencetak SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Jakarta. LKN.
- Sugianto.2016. Problematika Penegakan Hukum Dan Nawacita Jokowi-Jk Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Paper*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Revolusi Mental ASN dan UU ASN. Jakarta: Kementerian PAN dan RB.
- Usadhi.Naleka.2017. Implementasi Program Nawacita dalam Bidang Pendidikan untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul Tahun 2017. Manuscript. Unpublished.